

Bulog Serap 15.000 Ton Gabah Petani

KARANGANYAR (KR) - Bulog Subdivre Surakarta menyanggupi pembelian 15.000 ton gabah kering panen (GKP) hasil masa tanam (MT) I petani Karanganyar. Penyerapan oleh pemerintah diharapkan mengurangi keresahan petani akibat harga gabah yang anjlok. Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Perikanan (Dispertan PP) Karanganyar Siti Maesyaroch mengatakan penandatanganan kontrak kerjasama tersebut disaksikan aparat kepolisian, TNI, serta pejabat dari Pemprov dan pemeritah pusat di kantor Bulog Subdivre Surakarta pada Kamis (18/3). Selanjutnya, Bulog dipersilakan berburu gabah petani dari wilayahnya. "Petani tak perlu lagi resah. Penyerapannya oleh Bulog adalah hasil MT 1 sampai akhir Maret nanti. HPP (Harga Pembelian Pemerintah) untuk GKP adalah Rp 4.200/kg. Kalau Bulog ingkar tinggal disemprit. Kita sudah berkomitmen dengan disaksikan para aparat," kata Siti kepada KR, Sabtu (20/3). Laporan dari penyuluh pertanian menyebutkan bahwa perkiraan gabah yang belum dipanen sebanyak 15.000 ton. Maka, angka itulah yang disepakati kedua belah pihak untuk diserap. Siti mengatakan, penyuluh pertanian diinstruksi menyosialisasikan rencana penyerapan itu ke petani supaya mereka menanti datangnya petugas Bulog. **(Lim)-d**

Soal Beras Impor Pemerintah Tidak Gegabah

SEMARANG (KR) - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo minta petani tidak khawatir terkait kebijakan impor beras oleh pemerintah pusat. Ganjar yakin pemerintah pusat tidak terburu-buru dan tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan impor beras. Hal itu disampaikan Ganjar Pranowo, Jumat (19/3) malam, usai menerima Rektor UGM Prof Panut Mulyono, Wakil Rektor UGM Paripurna Poerwoko Sugarda dan tim GeNose C19 di rumah dinasny. Ganjar minta agar seluruh pihak menahan diri. "Sebaiknya semua menahan diri dulu, agar petani kita bisa menikmati hasil panennya dengan baik," tutur Ganjar. Menurut Ganjar Pranowo, yang mendesak untuk dipikirkan saat ini adalah serapan gabah atau beras hasil panen petani agar dilakukan lebih cepat, karena hal itu akan membuat para petani merasa nyaman dan sejahtera.

Apalagi ongkos produksi padi masa tanam kali ini cukup mahal. Untuk itu petani butuh perlindungan dari pemerintah. Dengan demikian jangan sampai ada keputusan yang bisa menyinggung perasaan petani. Ganjar Pranowo yakin pemerintah pusat tidak akan terburu-buru dalam mengambil keputusan impor beras di tengah musim panen raya. Ganjar juga berjanji untuk berkomunikasi dengan pusat pusat soal kebijakan impor beras ini. **(Bdi)-d**

Temanggung Miliki Perda Pembangunan Industri

TEMANGGUNG (KR) - DPRD Kabupaten Temanggung ketok Raperda Pembangunan Industri 2021 - 2041 menjadi perda, dalam sidang paripurna setelah dibahas dalam beberapa bulan terakhir, Jumat (19/3). Sekretaris Pansus II, DPRD Temanggung Dwi Lindawati mengatakan dalam pengembangan industri daerah ada beberapa yang harus diperhatikan yakni penyediaan kelestarian dan pembangunan pengembangan sumberdaya industri baik Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Alam (SDA). "Selain itu pemanfaatan teknologi insutrsi dan pengembangan kreativitas dan inovasi serta sumber pembiayaan," kata Dwi Lndawati. Dia mengatakan untuk pembangunan bernilai industri di Kabupaten Temanggung perlu dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Pengembangan Wilayah Peruntukan Industri dan Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Sedangkan khusus untuk pengembangan kawasan peruntukan industri yang sudah dimiliki kata dia, masih memerlukan perhatian yang lebih serius utamanya berkaitan dengan sarpras pendukungnya, untuk mengoptimalkan pemanfaatannya seperti jalan masuk fasilitas energi dan jaringan telekomunikasi. Disampaikan, dalam pembahasan perda, ada sejumlah penambahan dan perubahan pasal dan bab, serta lampiran sehingga lebih sempurna baik narasi dan substansinya. **(Osy)-d**

Dikawal, Disabilitas Ujian SIM D

KARANGANYAR (KR) - Satlantas Karanganyar memberi layanan istimewa bagi pemohon SIM D dari penyandang disabilitas. Polantas menjemput mereka dari rumah, mengantarkan ke kantor Satpas SIM, mengawal ujian, sampai mengantarkan pulang. Kasat Lantas Polres Karanganyar AKP Sarwoko, menjelaskan para difabel yang mengurus SIM D baru maupun perpanjangan tetap menjalankan uji praktik dan tulis seperti biasa. Namun, mereka mendapatkan pendampingan dari awal hingga akhir. "Cukup menghubungi KRING Lantas 082111073-332 untuk dijadwalkan penjemputan bikin SIM D baru dan perpanjangan. Kami siap mendampingi disabilitas," kata AKP Sarwoko kepada KR, Sabtu (20/3). Disediakan mobil untuk mengangkut pemohon berkursi roda maupun yang beralat bantu gerak lainnya. Terobosan tersebut sejalan dengan program yang dicanangkan Kapolri bahwa Polri siap bertransformasi menjadi prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan (Presisi). "Selama ini masih menganggap ke kantor polisi sulit enggak ada yang mengantar apalagi antreannya panjang. Nah, dengan Latar Jelita, kami yang mengantrekan. Disabilitas tinggal mengikuti ujiannya saja," jelasnya. Sekadar tahu, SIM D diperuntukkan bagi kalangan difabel yang bisa mengendarai sepeda motor modifikasi sesuai kondisi fisiknya. Program Latar Jelita disambut baik oleh warga penyandang disabilitas. Salah satunya dirasakan langsung manfaatnya oleh Zubadri Edy Wijayanto warga Matesih, Karanganyar. **(Lim)-d**



KR-Abdul Alim

Disabilitas dijemput Polantas untuk ujian SIM D.

Mantapkan Bangga Mbangun Desa Menuju Cilacap Sehat



CILACAP (KR) - Hari ini, Minggu (21/3) merupakan hari yang sangat istimewa bagi masyarakat Kabupaten Cilacap, Kabupaten Cilacap yang dicintai warganya, genap berusia 165 tahun.

Dalam rentang waktu 165 tahun itu, tentunya di samping banyak keberhasilan juga tidak terlepas dari berbagai persoalan dan hambatan yang dihadapi.

Dalam situasi pandemi Covid-19 yang dihadapi

saat ini, Bupati Cilacap Tarto Suwarto Pamuji, secara pribadi dan Pemerintah Kabupaten Cilacap meminta maaf, karena berbagai rencana pembangunan di Kabupaten Cilacap belum bisa berjalan dengan baik.

Pemerintah Kabupaten Cilacap bersama Forko-cilacap melalui Satgas Covid-19 Kabupaten Cilacap, akan terus berjuang untuk menanggulangi Covid-19 agar segera terwujud Kabupaten Cilacap yang sehat.

"Saya berharap masyarakat tetap semangat dalam melewati hari-hari yang berat karena pandemi Covid-19. Marilah senantiasa berdoa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, untuk selalu diberikan kesehatan dan dihindarkan dari berbagai musibah," katanya.

Di tengah keterbatasan yang dialami pada masa pandemi Covid-19 itu, pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Cilacap dapat meraih berbagai penghargaan baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi Jateng.

Hal tersebut dapat dicapai dengan kerja keras bersama dan dukungan seluruh warga masyarakat Cilacap. "Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut serta dalam membangun Cilacap, memberikan kepedulian dan partisipasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Diharapkan apa yang telah diberikan itu bisa terus ditingkatkan untuk Cilacap yang sehat, Cilacap yang

semakin sejahtera secara Bangga Mbangun Desa. merata dengan Program **(Mak)-d**



KR-Istimewa

Bupati Cilacap Tarto Suwarto Pamuji, Wakil Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rachman dan Sekretaris Daerah Farid Ma'ruf.

Satpol PP Sukoharjo Gencarkan Razia PGOT

SUKOHARJO (KR) - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sukoharjo Gencarkan razia dengan sasaran pengemis, gelandangan, dan orang telantar (PGOT). Razia digelar setelah petugas menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait keberadaan PGOT yang meresahkan karena meminta uang dengan cara paksa. PGOT yang berhasil ditangkap mayoritas berasal dari luar daerah.

Mereka telah mendapatkan peringatan dan pembinaan agar tidak melakukan kembali perbuatannya serta diminta pulang kembali ke asalnya.

Kepala Satpol PP Sukoharjo Heru Indarjo, Sabtu (20/3) mengatakan, Satpol PP Sukoharjo menerima banyak keluhan dari masyarakat berkaitan keberadaan PGOT berkeliaran di sejumlah tempat di beberapa wilayah.

Para PGOT tersebut dikeluhkan karena sering berkeliaran dan meminta uang dengan cara memaksa. Atas kejadian tersebut warga yang diminta uang menjadi takut dan melapor ke petugas.

Satpol PP Sukoharjo kemudian

langsung merespons dengan menerjunkan tim melakukan razia dengan sasaran PGOT. Hasil razia diketahui ada beberapa PGOT tertangkap dan langsung dilakukan pendataan.

Mereka juga mendapat peringatan keras serta pembinaan dari petugas. Dalam pendataan identitas diketahui para PGOT yang tertangkap Satpol PP Sukoharjo mayoritas berasal dari luar daerah.

Mereka sengaja masuk ke wilayah Kabupaten Sukoharjo untuk meminta uang pada warga.

Razia dengan sasaran PGOT dilakukan Satpol PP Sukoharjo seperti di simpang jalan, halaman

toko atau tempat usaha, terminal dan beberapa bangunan lain. Mereka ditemukan dalam kondisi berkerumun karena tidak memiliki tempat tinggal.

"Razia dengan sasaran PGOT kembali kami gencarkan lagi setelah muncul banyak keluhan dari masyarakat. Sebab PGOT tersebut berkeliaran dan meminta uang pada warga dengan cara paksa. Apabila warga tidak memberi maka PGOT tersebut akan bersikap kasar," ujarnya.

Salah satu wilayah yang menjadi sasaran razia PGOT oleh Satpol PP Sukoharjo berada di Kecamatan Grogol. Petugas mendapati beberapa PGOT berkeliaran dan meminta uang dengan cara paksa berhasil ditangkap.

Wilayah razia lain dilakukan di Kecamatan Kartasura seperti di simpang empat Kartasura juga ditemukan beberapa PGOT berkeliaran.

Pencegahan masuknya PGOT dari luar daerah dilakukan Satpol PP Sukoharjo dengan memperba-

nyak kegiatan patroli wilayah. Sasarannya khusus di perbatasan antara Kabupaten Sukoharjo dengan daerah lain seperti di wilayah Kecamatan Kartasura yang berbatasan langsung dengan Kota Solo.

Satpol PP Sukoharjo juga telah berkoordinasi dengan petugas lintas daerah terkait pencegahan masuknya PGOT. Salah satu bentuk koordinasi yakni dengan menggelar pemantauan bersama di wilayah perbatasan. Selain itu juga razia bersama gelar sebagai antisipasi masuknya PGOT.

"Kami juga memantau PGOT agar jangan sampai berkeliaran masuk ke perkampungan atau perumahan warga. Sebab kondisi sekarang masih pandemi virus korona. Antisipasi dilakukan berkaitan pencegahan keresahan warga karena diminta uang oleh PGOT dengan cara paksa, juga mengantisipasi kasus penyebaran virus korona dari PGOT karena mereka berasal dari luar daerah," lanjutnya. **(Mam)-d**

Bimtek Cetak Petani Milenial

TEMANGGUNG (KR) - Di tengah pandemi Covid-19 yang memperlambat segala sektor di dunia, pertanian berperan strategis yang tetap tumbuh positif di tahun 2020 perlu dipertahankan dan ditingkatkan, guna mendorong perekonomian nasional tetap bertumbuh. "Ini membuktikan bahwa sektor pertanian merupakan penopang ketahanan pangan yang kokoh," kata anggota Komisi VI DPR RI Vita Ervita SE, MBA, Sabtu (20/3). Vita Ervita menyampaikan itu pada Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pemuda Tani dan Penyuluh Pertanian khususnya Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Bawang Merah, yang digelar Kementerian Pertanian RI melalui Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSPDM). Politisi dari PDIP itu mengatakan bimtek ini adalah salah satu strategi program aksi guna mencapai cita-cita yang tidak main-main, yakni mendorong terciptanya 2,5 juta petani milenial, sebagai modal awal dalam mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan di Indonesia.

Di Kabupaten Temanggung, pertanian hortikultura yang menjadi andalan harus benar-benar mendapat perhatian serius. Di Temanggung Bimtek dikhususkan untuk komoditi bawang putih dan bawang merah, sedangkan di Wonosobo untuk kopi dan di Magelang peternakan. Dikatakan bimtek juga sebagai wujud nyata dan bentuk komitmen kehadiran Pemerintah dan Wakil Rakyat dalam peningkatan pertumbuhan dan penguatan kapasitas calon wirausaha muda pertanian dan juga para Penyuluh Pertanian. **(Osy)-d**

(*-1)-d

Satlantas Boyolali Pasang Kamera di Helm

BOYOLALI (KR) - Guna mendukung pelaksanaan program sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Boyolali, memasang sejumlah kamera portable pe-nindakan kendaraan bermotor atau disebut kopek. Hal ini bertujuan untuk menjangkau wilayah yang belum terpasang kamera ETLE.

Kopek juga akan mengidentifikasi wajah pengguna motor yang terintegrasi dengan data Surat Izin Mengemudi (SIM) dan e-KTP, program kopek ini untuk menghindari kontak langsung antara petu-

gas dan pelanggar, sehingga tidak terjadi Win-Win Solution di lapangan. Bahwa Kopek tersebut akan diluncurkan serentak di Jateng, Selasa (23/3) mendatang. Untuk Kabupaten Boyolali, akan ada empat kamera yang nantinya merekam pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

"Kopek cara kerjanya adalah merekam segala pelanggaran lalu lintas yang ada di jalan raya khususnya. Jadi pada saat kopek itu merekam ada pelanggaran kendaraan yang tidak menggunakan helm atau mungkin melanggar marka atau melawan arus otomatis akan

terekam melalui kamera kopek," ujar Kasat Lantas Polres Boyolali AKP Yuli Anggraeni mewakili Kapolres Boyolali AKBP Morry Ermond, Jumat (19/3).

Satlantas Boyolali akan segera mencocokkan data induk dengan data Samsat dan akan memberikan surat konfirmasi kepada pelanggar tersebut. "Kita tunggu sampai kurang lebih lima hari konfirmasi itu ke kita kalau memang dari pihak pelanggar tidak memberikan konfirmasi kepada kita otomatis data pelanggar akan terblokir di data Samsat," terangnya.

"Sistem kerja kamera pada saat patroli mobiling

dengan menggunakan kendaraan, petugas menyisir jalan protokol. Setelah kita kembali ke mako kita akan membuka kembali data tersebut, dan kita bisa me-

ngecek. Kemudian kita akan mengambil gambar dan memberikan konfirmasi beserta gambar yang sudah terekam," jelas Yuli Anggraeni. **(*-1)-d**



KR-Mulyawan

Petugas Satlantas Polres Boyolali mempersiapkan diri menjelang pelaksanaan tilang elektronik.